

KONFIGURASI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENATA PEMERINTAHAN MADANI

**¹Dr. Zahari, S. Kom.I., M. Kom.I.; ²Dr. T. Faizin, M. Kom. I;
³Jafaruddin**

¹zahari@unimal.ac.id; ²teukufaizin@uinsuna.ac.id; ³jafaruddin@unimal.ac.id

¹Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

²Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah
Lhokseumawe

³Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Konfigurasi komunikasi politik pemerintah dalam menata pemerintahan kota Banda Aceh Madani dan menganalisis Komitmen komunikasi politik walikota dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh madani. Penelitian ini didesain penelitian kualitatif deskriptif. Informan kunci dalam kajian penelitian ini adalah walikota Banda Aceh, satuan kerja pemerintah daerah kota Banda Aceh dan masyarakat kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori struktur organisasi dan Teori Komunikasi Islam. Hasil temuan penelitian, Konfigurasi komunikasi politik walikota dalam menata pemerintahan dilakukan dengan berbagai aktor politik dan pemangku kepentingan daerah kota Banda Aceh untuk mendapat dukungan politik serta dapat menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif. Faktor pendukung komunikasi politik

walikota adanya legalitas hukum, ekonomi, budaya masyarakat, keamanan. Komitmen komunikasi politik walikota dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh madani mulai terbentuk. Komitmen politik walikota diataranya membangun syariat Islam secara kaffah, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, membangun ekonomi kerakyatan, menumbuhkan masyarakat yang beriteletualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, membangun infrastruktur pariwisata yang Islami, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik, dan perlindungan anak, membangun peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan. Adapun Saran perlu konfigurasi komunikasi dan komitmen komunikasi politik pemerintah kota Banda Aceh yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat madani.

Kata Kunci: Konfigurasi Communication, Commitment Politik, Developmen Government Madani

1. Introduction

Konfigurasi politik merupakan suatu konstalasi kekuatan politik dari gabungan partai politik dan pemangku kepentingan dalam suatu pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, konfigurasi politik memberikan ruang yang luas bagi perwakilan masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam menata pemerintahan. Konfigurasi politik sangat ditentukan oleh partai politik, pelaksanaan hukum dan peran eksekutif. Kemampuan konfigurasi komunikasi politik dan komitmen komunikasi komitmen politik sangat di perlukan dalam membangun sistem pemerintah. Selain itu pemetaan kondisi geopolitik, pemetaan geografis, pemetaan demografis di setiap daerah untuk sangat diperlukan dalam merumuskan geostrategis arah sasaran kebijakan yang akan di tetapkan dalam menata pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar menata pemerintahan dalam membangun sistem pemerintahan.

Dalam menata pemerintahan madani untuk menjadi sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan

kesatuan, toleransi dalam perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang public yang luas, disamping itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Keadaan ini sangat diharapkan oleh pemerintah kota banda aceh dalam membangun warga kota banda aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, memiliki harga diri yang tinggi, berbudaya dan beradab. Namun hal ini akan tercapai bila mana pemerintah dapat berkonfigurasi komunikasi politik dengan baik antara actor politik dari berbagai unsur perwakilan yang terlibat dalam pembangunan serta dapat menjamin kestabilan pembangun bagi masyarakat. Baik stabilitas ekonomi, politik, social budaya, hukum dan keamanan. Untuk menuju proses kestabilan pembangunan tersebut perlu adanya keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan persamaan hak, serta regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Upaya dalam menata pemerintah dan membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota Madani. Pemerintah kota banda aceh memiliki komitmen komunikasi politik akan meningkatkan kualitas pengamalan syariat Islam secara kaffah, memperkuat tata kelola pemerintah yang baik, memperkuat ekonomi kerakyatan, menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata Islami, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak, serta meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota. Dengan adanya kemampuan komunikasi politik walikota dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model Madani. Walikota Banda Aceh ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal telah membawa perubahan yang besar dalam membangun daerah kota Banda Aceh sehingga masyarakat kota Banda Aceh saat ini mulai terbentuk suatu sistem sosial masyarakat kota sebagai model kota Madani.

Dalam Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana konfigurasi komunikasi politik pemerintah dalam menata pemerintahan kota banda aceh sebagai model kota madani, dan menganalisis komitmen komunikasi politik pemerintah dalam membangun masyarakat kota banda aceh sebagai masyarakat madani.

2. Riview of Literatures

2.1. Konfigurasi of Political Communication

Konfigurasi menurut para ahli adalah suatu pembentukan susunan, setingan atau proses pembuatan wujud dari sebuah benda. Kata konfigurasi umum digunakan dengan menambahkan kata yang kemudian akan memperjelaskan arti kata konfigurasi sendiri. jika kata konfigurasi ditambah dengan kata politik maka menjadi konfigurasi politik. Konfigurasi politik dapat didefinisikan sebagai konstalasi kekuatan politik. Dalam konfigurasi politik demokrasi, sistem politik memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Reprsentatif-reprsentatif ini ditentukan atas dasar jamlah mayoritas wakil-wakil rakyat dan didasarkan atas kesamaan politik serta diselenggarakan atas kebebasan politik. Konfigurasi politik sangat ditentukan oleh partai politik, pelaksanaan hukum, dan peran eksekutif (Warkum Sumitro, 2014: 109).

Para aktor politik tersebut diibarat bagaikan nahkoda kapal yang akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Peran para aktor politik dalam konteks membangun dan menata sistem pemerintahan diharapkan dapat memberi kontribusi baik dalam pengawasan tindakan, pemikiran sesuai dengan apa yang telah menjadi komitmen komunikasi politik yang lahir dari konfigurasi politik yang telah dibahas Bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik dalam masa pembangunan jakan pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang yang hendak dicapai dalam menata pemerintahan dari hasil pemetaan goepolitik daerah dan geostrategis pemerintah pusat.

2.2. Political Communication Commitment

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Komunikasi politik dapat diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan diantara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud disampaikan dapat dipahami.¹ Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum medefinisikan komunikasi politik adalah hubungan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 2008),h. 77

pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, intansi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah. Miriam Budiarmo menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi *public policy*.² Sementara Bodan Gunawan sekretaris negara era presiden Abdurrahman Wahid juga menyampaikan komunikasi politik merupakan interaksi pemerintah dengan rakyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyatnya, demi terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean governance*).³

Komunikasi politik memegang peranan besar dalam suatu negara, maka setiap negara memiliki komunikasi politik walaupun berbeda-beda. Peranan komunikasi politik yang pada hakekatnya adalah interaksi antar warga guna mencapai perolehan hak yang dimiliki oleh kebudayaan struktur masyarakat dan individu dalam suatu kompleks hubungan sosial, dengan kata lain komunikasi politik dalam sistem demokrasi lebih terfokus untuk kepentingan rakyat dimana Komunikasi politik adalah interaksi komunikasi pemerintah dengan rakyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Komunikasi politik diperlukan para elite politik yang memegang kekuasaan politik dalam negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah seperti kepala daerah memegang peranan penting dalam komunikasi politik karena dia adalah pemimpin masyarakat di daerahnya yang harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.⁴ Maka pemerintah menggunakan komunikasi politik agar terhubung untuk menyalurkan kebijakan pembangunan atau kebijakan politik nasional dengan aspirasi yang lahir dan berkembang di

² Ibid...h.3

³ Ramlan Surbakti, *Ilmu Politik*, Cet Ke 7 (Jakarta: Kompas Gramedia 2010), h. 152

⁴ Farid Hamid & Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang Dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group 2011), h. 315

masyarakat sehingga menjadi kekuatan aktual yang dapat mendorong laju pembangunan agar masyarakat sejahtera.

2.3. Organize Civil City Government

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu konsep *Good Governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, menekan pada peranan pemerintah agar memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas korupsi.⁵

Sementara itu negara donor dan lembaga-lembaga multilateral telah mengambil peran yang mengemuka (*A Leading Role*) dalam merumuskan *good governance*. Istilah *governance* sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosial. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan pemerintah, rakyat, dan usahawan. ketiganya itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Namun, tata kelola

⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2007),h. 61

pemerintahan yang baik dalam sistem demokrasi, rakyat harus memperoleh peran yang utama karena dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain dari ketiga tersebut, pemerintah, rakyat dan usahawan yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintah yang baik adalah moral.

3. Method

Paradigma penelitian ini adalah paradigma constructivism. Guba dan Lincoln memperjelaskan, konstruktivisme ini kerap disebut sebagai proses sosial.⁶ Denzim dan Lincoln, menilai bahwa paradigma penelitian memiliki 3 elemen atau asumsi, yaitu epistemologi, antologi dan metodologi yang bisa menjadikan perbedaan mendasar antara paradigma tersebut.⁷ Jenis dan Pendekatan Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan fokus penelitian.⁸ Bogdan dan Taylor menjelaskan Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Lokasi penelitian penelitian dilakukan di kota Banda Aceh. Adapun informan peneliti adalah walikota sebagai pejabat pemerintah kota Banda Aceh, satuan kerja perangkat daerah kota Banda Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Banda Aceh (Bappeda), Kepala Dinas Syariah Islam kota Banda Aceh, Ketua Majelis Adat kota Banda Aceh, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, dan masyarakat kota Banda Aceh. Penentuan informan kunci dalam penelitian ini bersifat nonprobabilitas melalui teknik Purposive Sampling.

Sumber Data Penelitian diperoleh langsung melalui dokumentasi, wawancara (*Indept Interview*), dengan para narasumber sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, asumsi teori, jurnal penelitian terdahulu, proceeding, dokumentasi kliping pers dan observasi khusus

⁶ Norman k. Denzin, Yonna S. Linconl, *Handbook Of Qualitatif Research. (California: Sage Publication. Ed 1994)*, h.107

⁷ *Ibid.*

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

⁹ *Ibid.*

subjek penelitian. metode analisis triangulasi sumber dan triangulai teori. Instrumen pengumpulan data berupa alat rekaman wawancara, pedoman wawancara, alat potret narasumber, panduan observasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*), ketika berada dilokasi penelitian (*Getting a long*) dan tahap pengumpulan data (*Longging The Data*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; Observasi (*Field Research*), wawancara mendalam (*In Dept Interview*) dan Studi dokumentasi. Teknik Menjaga Keabsahan munggunakan dua cara yaitu dengan kompetensi subjek riset dan trustworthines yaitu kebenaran dan kejujuran subjek riset. Trustworthines mencakup dua hal; autenticity, dan analisis trianggulasi. Teknik Analisis dan Pengolahan Data mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verivications*)

4. Result

4.1. Political Conifgurasi in Managing the City Government of Banda Aceh Madani

Konfigurasi politik pemerintah Banda Aceh dalam Merumuskan kebijakan menata sistem pemerintahan kota Banda Aceh sebagai model kota Madani melibatkan banyak aktor-aktor politik. Peran aktor politik tentulah sangat diperlukan lebih dalam mewujudkan cita-cita bersama demi kesejahteraan masyarakat. Dalam menata sitem pemerintahan kota Banda Aceh madani serta membangun masyarakat sebagai model masyarakat kota madani tidak hanya cukup peran dan fungsi wewenang dari pemerintah kota atau walikota saja. Pemerintah kota Banda Aceh sangat membutuhkan berbagai elemen masyarakat mulai dari masyarakat desa, para Ulama, para Akademisi, Peneliti, maupun birokrasi pemerintah, pihak keamanan dan yang utama peran pemangku kepentingan daerah dan aktor-aktor politik yang telibat dalam mengambil kebijakan dalam suatu pemerintahan.

Menurut Pak Isril Sabil,¹⁰ Mengenai aktor-aktor politik yang memainkan peranan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota Banda Aceh sebagai model kota madani yaitu walikota sendiri sebagai konseptor pembangunan kota Banda Aceh baik dalam jangka pembangunan pendek, menengah, dan pembangunan jangka panjang, beliau telah merumuskan kebijakan pembangunan kota Banda Aceh menuju kota Tamaddum, dan wakil walikota yang ikut memberi kontribusi besar dalam pengembangan pembangunan kota Banda Aceh madani, di dalam diri beliau terlihat semangat untuk membangun kota yang berlandaskan syariat Islam yang kaffah. kemudian paradigma konsep pembangunan disampaikan kepada para pemangku kepentingan kota Banda Aceh, lalu merumuskan kembali bersama sehingga ditetapkan sebagai visi dan misi pembangunan kota Banda Aceh. Jadi perangkat daerah ini mulai dari Walikota Banda Aceh, seluruh satuan kerja kepala daerah, mereka sepakat menjadikan kota Banda Aceh sebagai model kota Madani. Lebih lanjut terkait dengan peran perwakilan rakyat kota Banda Aceh dalam menjadikan Banda Aceh sebagai model kota Madani.

Dewan perwakilan rakyat kota Banda Aceh selaku anggota Legislatif sangat berkomitmen memberi dukungan agar terbentuk sistem tata pemerintahan kota Banda Aceh sebagai model kota Madani. Sementara itu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat kota Banda Aceh sebagai pengawas juga tetap berjalan. Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah kota banda aceh namun para anggota dewan perwakilan rakyat kota banda aceh tidak sepenuhnya juga menyetujui semua yang diajukan oleh pihak pemerintah kota, akan tetapi legislatif juga harus melihat bagaimana program pemerintah kota banda aceh dari berbagai sudut pandang dan kemanfaatan dalam membangun agama, program tentang pembangunan daerah adakah berpihak kepada masyarakat, dan sebagainya. Pemerintah kota banda aceh memainkan peranan dan tanggung jawab lebih bersemangat dan bekerja keras dalam membangun tata sistem pemerintahan kota Banda Aceh sebagai kota Madani dengan segenap jajarannya dan perangkat kerja daerah kota

¹⁰ Isril Sabil, Ketua Bagian Umum Kepegawaian dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, Wawancara di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh 9 Januari 2017 Pukul 9:00

Banda Aceh seperti halnya dinas syariat Islam kota Banda Aceh, MPU kota Banda Aceh, dinas pariwisata, dan linmas kesbangpol yang lebih kepada keamanan dan kemudahan. Linmas kesbangpol bertugas sebagai orang yang menjembatani hubungan antar agama.¹¹

Konfigurasi Komunikasi politik pemerintah kota banda aceh dengan dewan perwakilan rakyat kota banda aceh, satuan kerja pemerintah kota, pemangku kepentingan dan masyarakat kota Banda Aceh sehingga semua ingin membantu mempercepat membangun dan mewujudkan kota Banda Aceh sebagai model kota Madani. Untuk terwujudnya kota Banda Aceh sebagai model kota Madani Walikota membagi peran dan fungsi masing- masing perangkat kerja daerah sesuai dengan fungsi, kewenangan dan peran. Aktor-aktor yang memainkan peranan dalam merumuskan maupun berperan mengawasi diadakannya Banda Aceh sebagai kota Madani yakni, pihak pemerintah kota itu sendiri (eksekutif), pihak DPRK Banda Aceh (legislatif), Dinas Syariat Islam Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Linmas Kesbangpol Banda Aceh, dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh. Aktor-aktor tersebut terutama pemerintah kota (Walikota dan wakil Walikota) yakni Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal, selanjutnya pada tahun 2012-2017 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki visi: Banda Aceh Model Kota Madani.¹²

Konfigurasi politik walikota Banda Aceh dengan aktor politik dan pemangku kepentingan daerah yang akhirnya melahirkan regulasi untuk dapat menjalankan program-program pembangunan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat kota Banda Aceh sebagai model Madani, dari hasil konfigurasi politik melalui pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh walikota Banda Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat kota Banda Aceh, Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Banda Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, TNI dan Polri, Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, Investor,

¹¹ H. Ilmiza Saaduddin Djamal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Wawancara di Kantor DPRK, 12 Januari 2017 Pukul 9:30

¹² Maulida Ulfa, *Politik Pembangunan Islam: Studi Terhadap Kota Madani di Banda Aceh*, (Universitas Sumatera Utara: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2016), h. 67

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat melahirkan berbagai macam Qanun kota Banda Aceh, Peraturan Walikota Banda Aceh diantaranya 1) Qanun kota Banda Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017. 2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat. 3) Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2012 tentang rencana kerja pembangunan kota banda aceh tahun 2013. 4) Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2012 tentang pendidikan aqidah dan akhlak.¹³

4.2.Comitment Comunication Politic Government City Banda Aceh

Komitmen komunikasi politik walikota Banda Aceh ingin membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani ini muncul dari pementaan analisis geopolitik, kondisi alamiah daerah, kebijakan pembangunan daerah propinsi Aceh dan visi pembangunan nasional serta keinginan kuat dari walikota sendiri. Paradigama walikota dalam membangun daerah kota Banda Aceh merujuk kepada konsep pembagunan Rasulullah di madinah, dan sultanah-sultanah Aceh dalam membangun daerah.¹⁴ Keberhasilan dan kesuksesan dalam membangun negara dan daerah pada dasarnya berkomitmen penuh dalam menjalankan dan menegakkan syariat Islam agar menjadi kokoh dan bersemayam dalam jiwa-jiwa masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu walikota yakin dan komitmen untuk melanjutkan membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani yang tidak lepas dari membangun syariat Islam. Komitmen komunikasi politik tersebut dirumuskan bersama pemangku kepentingan daerah kota Banda Aceh yang pada akhirnya ditetapkan dalam Qanun Aceh

¹³Sumber: Data Diperoleh Dari Kantor Walikota Banda Aceh, Tahun 2017

¹⁴Hasil Wawancara dengan Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal, di Rumah Beliau Lam Dinggin 11 Januari 2017 Pukul 10:30

¹⁵Tun Dr. Mahathir Mohammad dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Harian Umum Waspada, Senin (18/7/2016) di Medan, Sumut. Hotel Jw Mariott

No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017. “Banda Aceh model kota Madani”¹⁶

Kota banda aceh Madani yang dimaksud adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, dan sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab. Dalam sistem pemerintah kota banda aceh madani pemerintah menerapkan: (1) Prinsip demokrasi yaitu menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat. (2). Prinsip partisipasi memberi ruang setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. (3). Prinsip transparansi menciptakan arus informasi yang terbuka kepada publik sehingga publik dapat memahami program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. (4). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. (5). Prinsip akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta masyarakat. (6). Prinsip desentralisasi, Penyerahan sebahagian wewenang pemerintah kota kepada pemerintah dibawahnya.

Sementara secara nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kota Banda Aceh merupakan modal yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan kedepan. Nilai-nilai utama ini merupakan landasan operasional yang dapat menstimulus stakeholder dalam mencapai visi dan misi. Nilai-nilai utama yang dimaksud yaitu:

¹⁶ Mawardy Nurdin. *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Indomedia 2011), h. 160

- a. Ketakwaan: nilai-nilai keimanan umat manusia/hamba Allah kepada khalik/penciptanya. Secara lebih lengkapnya ketaqwaan adalah, menjalankan segala kewajiban, menjauhi semua larangan dan syubhat (perkara yang samar), selanjutnya melaksanakan perkara-perkara sunnah (mandub), serta menjauhi perkara-perkara yang makruh (dibenci);
- b. Keadilan: sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya serta dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. Profesionalisme: terampil, handal dan bertanggung jawab serta penuh dedikasi dalam menjalankan profesinya;
- d. Kejujuran: suatu nilai dimana sikap dan ucapan sesuai dengan keadaan dan tindakan yang sebenarnya, memberitakan kebenaran tanpa diganti, diubah, dikurangi atau ditambah. Hal ini berimplikasi pada pengambilan kebijakan agar pelaksanaan sesuai dengan cita-cita awal pada saat kebijakan itu ditetapkan, disosialisasikan dan dijelaskan sebagaimana adanya;
- e. Integritas: kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggung jawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat;
- f. Tanggung jawab: kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan;
- g. Kerjasama: komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri; dan
- h. Berkelanjutan: pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.¹⁷

¹⁷Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017

4.3. Governing the City of Banda Aceh Madani

Pemerintah kota Banda Aceh berkomitmen untuk membangun dan menata pemerintahan sebagai model kota banda aceh Madani dalam mewujudkan kota Banda Aceh sebagai model kota Madani, pemerintah kota Banda Aceh mencanangkannya ke dalam suatu keinginan, tekad dan komitmen bersama yang kuat kedalam 7 misi, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yaitu:

Pertama : *Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah* Kedu: *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

Ketiga : *Memperkuat Ekonomi Kerakyatan*

Keempat: *Menumbuhkan Masyarakat Yang Beritelektualitas, Sehat dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya*

Kelima : *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Parawisata yang Islami*

Keenam : *Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak.*

Ketujuh : *Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota.*¹⁸

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota banda aceh dalam peningkatkan pengamalan syariat Islam melalui pendidikan, kajian dan dakwah untuk masyarakat terutama kepada anak-anak dan para remaja; kemudian Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran orang tua, tokoh-tokoh ulama, pendidik dan masyarakat, terutama kepada para remaja dan generasi muda, lalu Meningkatkan intensifikasi penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah atau qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat Islam; setelah itu Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi, serta Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam, dan Meningkatkan kegiatan pengajaran Al-Qur'an dalam keluarga dan masyarakat; serta meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial; Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan

¹⁸ Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017

sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat; lalu membina serta mengarahkan dan mendidik masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban; terakhir Meningkatkan manajemen pendidikan Islami dan diniyah.

Kebijakan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia pemerintah kota Banda Aceh untuk peningkatan kualifikasi melalui pendidikan formal, dan Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional; Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ; Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah; Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal; terakhir perlu peningkatan Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi.

Kebijakan dalam bidang pariwisata, Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah. Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keacehan, Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD, Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan, Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan, Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat.

Kebijakan dalam Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya; Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar dimanca negara, Setiap kecamatan dan desa memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau; Mengadakan pelatihan ketrampilan dan

mengoptimalkan fungsi BLK, Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank, Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan, Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan, Pengoptimalan fungsi pasar, Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan.

Kebijakan dalam Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesuai standar. Walikota Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata, Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi; Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota; Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh, Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif, Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh, Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh, Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

Kebijakan dalam Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan, Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi, Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, Kaderisasi perempuan potensial di parpol, Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender, Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Peningkatan kapasitas perempuan diperdesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian perdesaan, Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal, Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja dan Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai.

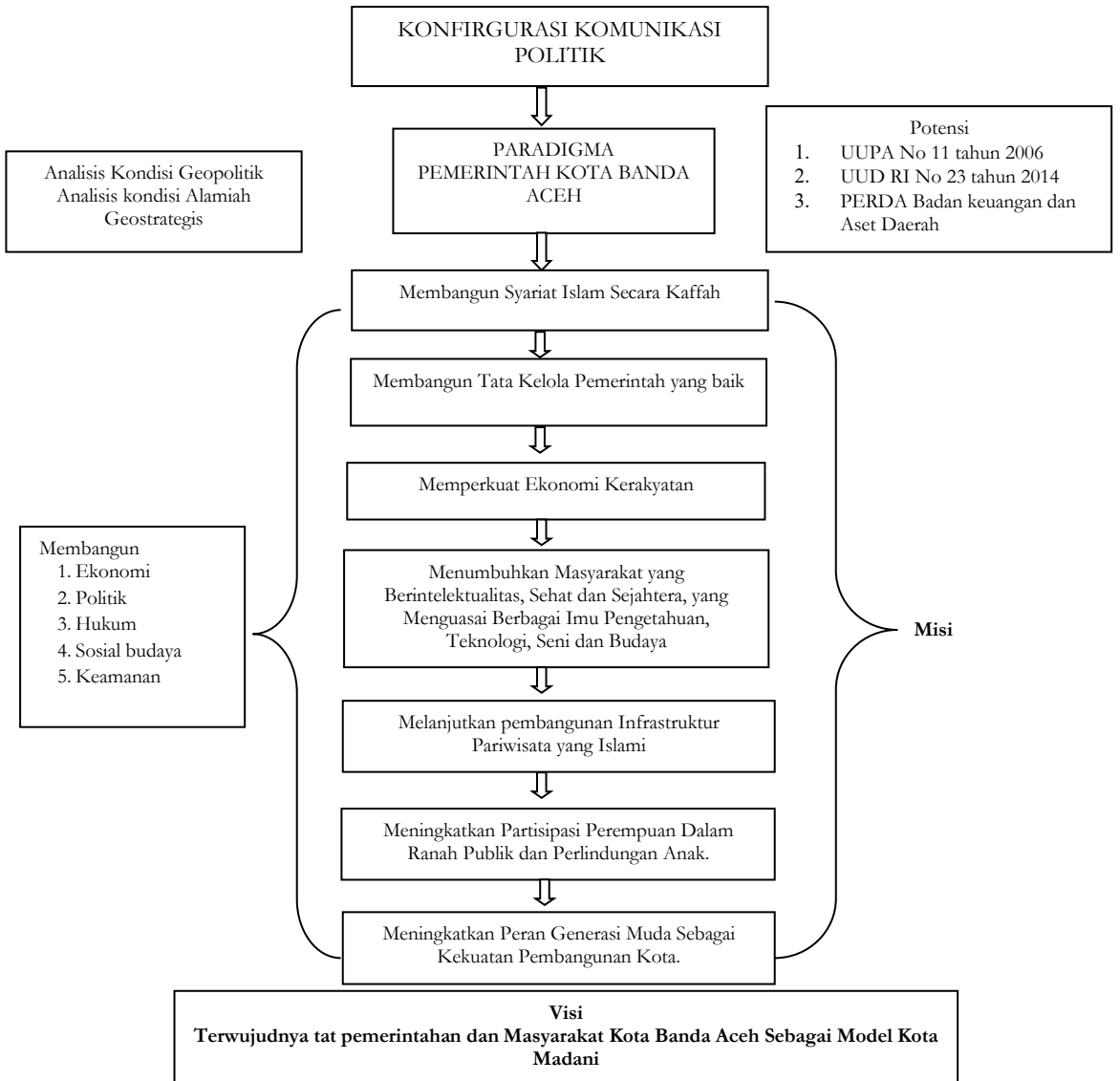


Figure 1. Figure Title (Model Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Madani)

5. Discussion

Komitmen komunikasi politik walikota Banda Aceh ingin membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani ini muncul dari hasil pementaan analisis geopolitik, kondisi alamiah daerah, kebijakan pembangunan daerah propinsi Aceh dan visi pembangunan nasional, serta keinginan kuat dari walikota sendiri. Paradigama walikota dalam membangun daerah kota Banda Aceh merujuk kepada konsep pembagunan Rasulullah di Madinah, dan Sultanah-sultanah Aceh dalam membangun daerah. Keberhasilan dan kesuksesan dalam membangun negara dan daerah pada dasarnya berkomitmen penuh dalam menjalankan dan menegakkan syariat Islam agar menjadi kokoh dan bersemayam dalam jiwa-jiwa masyarakat. Oleh karena itu walikota yakin dan komitmen untuk melanjutkan membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani yang tidak lepas dari membangun syariat Islam secara kaffah.

Model Komunikasi politik walikota dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani, berlangsung dalam suatu matrik struktur sosial, dimana komunikasi bermula, berkembang, dan berlangsung terus-menerus dalam situasi sosial. Model komunikasi politik yang digunakan walikota yaitu model komunikasi politik linear, model komunikasi politik interaksional, maupun model komunikasi politik transaksional dengan pihak pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. untuk mempercepat pembangunan masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani, walikota membangun komunikasi politik melalui satuan kerja kepala daerah kota Banda Aceh, tim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Komite Penguat Akidah dan Pengamalan Agama Islam, Melalui Dai Perkotaan, dan dengan Mutashib Gampong.

Pemerintah kota Banda Aceh sebagai salah satu aktor politik yang ingin menata pemerintahannya sebagai model kota Madani, tentulah memiliki tujuan dalam hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak Bachtiar yang berkedudukan sebagai Asisten I Pemerintahan Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan dalam menjadikan Banda Aceh sebagai model kota Madani, pihak pemerintah kota juga telah memiliki persiapan. "Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan sebagai landasan. Konsep-konsep dasar kita kan melaksanakan, mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota Madani. Tentu

banyak sekali hal yang kita lakukan, seperti masalah agama, masalah pembangunan, masalah pemberdayaan ekonomi rakyat, masalah pemberdayaan perempuan, masalah pemberdayaan pemuda, dimana hal itu merupakan visi kita yang kita laksanakan untuk membangun. Bukan hanya agama saja model kota Madani, hal-hal yang kita sebut diatas juga merupakan model kota Madani. Selain itu, menyantuni fakir miskin juga model kota Madani. Seluruh aspek kehidupan dibungkus dan dijaga dengan konsep dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Hal itu merupakan proses yang harus kita lakukan secara perlahan." Selanjutnya, jika dilihat dari segi infrastrukturnya (pembangunan), telah mendukung untuk menjadikan Banda Aceh sebagai model kota Madani.

Hambatan dan pendorong walikota dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani. Adapun hambatan dalam membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani antara lain; 1) Pemahaman masyarakat sangat kurang dalam memahami Program walikota membangun daerah kota Banda Aceh sebagai model kota madani, padahal dalam membangun masyarakat madani yang tertuang dalam misi pertama walikota adalah menjalankan syariat Islam secara kaffah, namun syariat Islam yang dipahami oleh masyarakat masih rendah hanya sebatas kewajiban secara pribadi. 2) Dalam membangun masyarakat daerah kota Banda Aceh sebagai model kota madani masih memiliki keterbatasan Qanun atau peraturan daerah dalam penerapan syariat Islam sebagai landasan yuridis atau berupa payung hukum untuk pelaksanaannya. Untuk saat ini yang terkait dalam tugas pengawasan hanya lima qanun yaitu; (a) Qanun no 11. Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan syi'ar, (b). Qanun no 11 tahun 2003 tentang minuman (khamar) dan sejenisnya, (c). Qanun no 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), (d). Qanun no 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), (e). Qanun no 7 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan qanun yang berhubungan dengan zina, pencurian, pembunuhan belum dikeluarkan. Sementara Faktor pendorong untuk membangun masyarakat kota Banda Aceh sebagai model kota madani antara lain: (a), Faktor Ekonomi, Budaya, Politik, hukum dan keamanan daerah.

6. Acknowledgement

Konfigurasi politik Walikota Banda Aceh dalam menata pemerintahan sebagai model kota madani dilakukan dengan pendekatan komunikasi politik dengan pemangku kepentingan kota Banda Aceh dan kelompok masyarakat sehingga melahirkan berbagai macam qanun atau peraturan daerah, dan peraturan walikota Banda Aceh, diantaranya 1) Qanun kota Banda Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017. 2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat. 3) Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2012 tentang rencana kerja pembangunan kota Banda Aceh tahun 2013. 4) Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2012 tentang pendidikan aqidah dan akhlak.

REFERENCES

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, 2008)
- Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017
- Farid Hamid & Heri Budiarto, Ilmu Komunikasi: Sekarang Dan Tantangan Masa Depan Jakarta: Kencana Prenanda Media Group 2011
- H. Ilmiza Saaduddin Djamal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Wawancara di Kantor DPRK, 12 Januari 2017 Pukul 9:30
- Hasil Wawancara dengan Walikota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal, di Rumah Beliau Lam Dinggin 11 Januari 2017 Pukul 10:30
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Isril Sabil, Ketua Bagian Umum Kepegawaian dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, Wawancara di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh 9 Januari 2017 Pukul 9:00
- Maulida Ulfa, Politik Pembangunan Islam: Studi Terhadap Kota Madani di Banda Aceh, Universitas Sumatera Utara: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2016
- Mawardy Nurdin. Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi, Jakarta: Indomedia 2011
- Miftah Thoha, Birokrasi Politik Di Indonesia, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2007
- Norman k. Denzin, Yonna S. Linconl, Handbook of Qualitatif Research. California: Sage Publication. Ed 1994
- Ramlan Surbakti, Ilmu Politik, Cet Ke 7 Jakarta: Kompas Gramedia 2010
- Sumber: Data Diperoleh Dari Kantor Walikota Banda Aceh, Tahun 2017

Konfigurasi Komunikasi Politik Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Pemerintahan
Madani

Tun Dr. Mahathir Mohammad dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Harian Umum Waspada, Senin (18/72016) di Medan, Sumut. Hotel Jw Mariott